



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT
berintegritas cerdas berkualitas

TAHUN 2025

BUKU INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK PROFIL



 inspektorat.pontianak.go.id

 inspektorat@pontianak.go.id

 @inspektorat_kota_pontianak

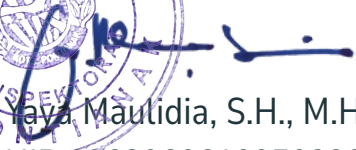
 (0561) 8103435

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Buku Profil Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk melakukan publikasi data melalui penerbitan buku profil. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi oleh semua pihak. Edisi online dari Buku Profil Inspektorat Kota Pontianak akan kami publikasikan melalui laman <https://inspektorat.pontianak.go.id>.

Pada penyusunan Buku Profil Inspektorat Tahun 2025 ini, kami berusaha menampilkan penyajian data yang lebih variatif dan diusahakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk grafik.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan buku ini. Harapan saya, penerbitan Buku Profil Inspektorat Kota Pontianak berikutnya dapat terealisasi dan berkesinambungan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita dalam usaha peningkatan kinerja dilingkungan Inspektorat Kota Pontianak

Pontianak, Oktober 2025
Inspektur

Yaya Maulidia, S.H., M.H., CGCAE
NIP 196806061995032003

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	I
<u>DAFTAR ISI</u>	II
<u>INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK</u>	01
<u>SUMBER DAYA MANUSIA</u>	05
<u>PROGRAM KERJA PENGAWASAN</u>	08
<u>ANGGARAN</u>	12
<u>CAPAIAN KINERJA</u>	20
<u>DOKUMENTASI KEGIATAN</u>	30





GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan pada Inspektorat Kota Pontianak yang menjadi kewenangan Daerah. Selain itu, tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efisien, dan efektif yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas antara penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan kedudukan, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan dan sasaran.

TUJUAN & SASARAN



TUJUAN

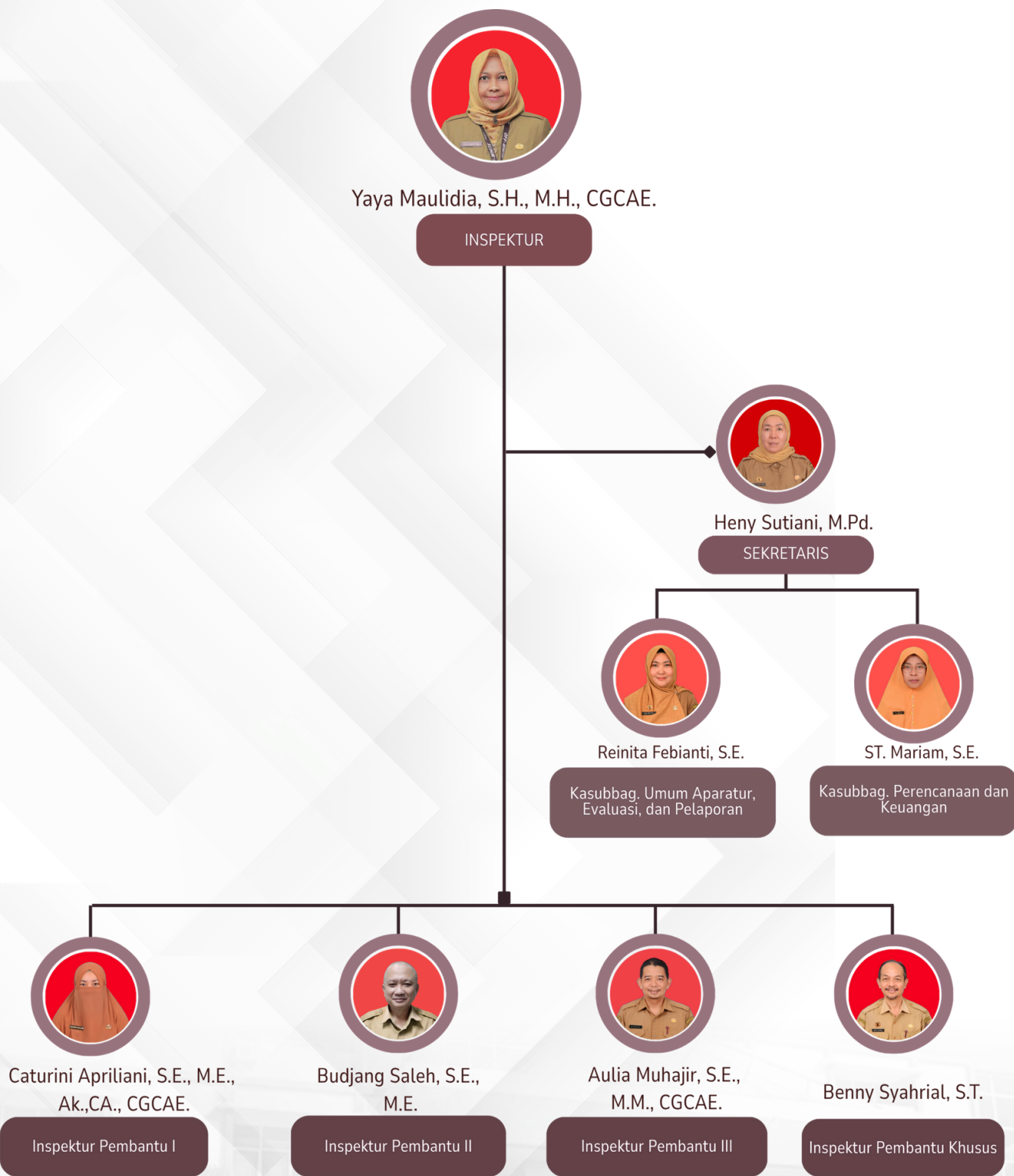
Tujuan Inspektorat Kota Pontianak adalah Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak dan Meningkatkan Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi di Kota Pontianak.



SASARAN

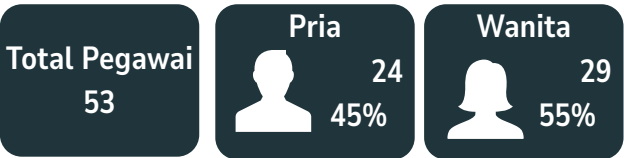
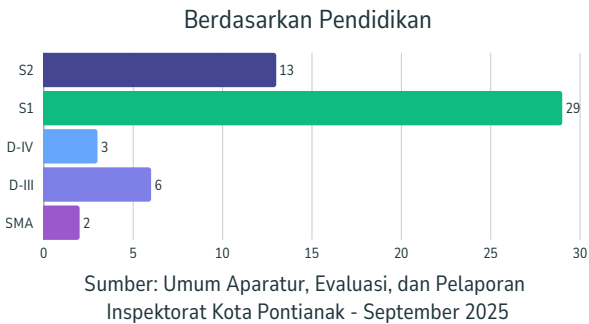
- Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan.
- Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada IPKD MCP Pemerintah Kota Pontianak.
- Meningkatnya Kualitas Efektivitas Pengendalian Korupsi

STRUKTUR ORGANISASI

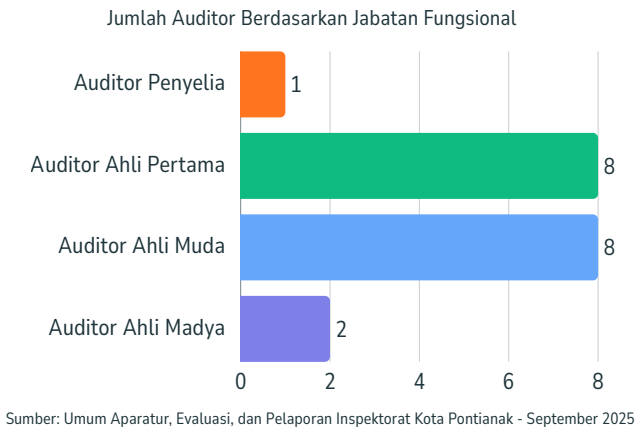
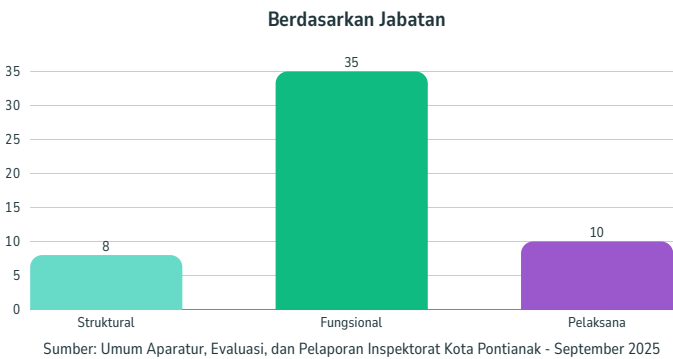




Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh 53 orang dengan rincian sebanyak 24 orang berjenis kelamin laki-laki atau 45% dari seluruh pegawai dan 29 orang berjenis kelamin perempuan atau 55% dari seluruh pegawai Inspektorat Kota Pontianak. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Kota Pontianak didominasi oleh Program Strata 1 (S1) sebanyak 29 pegawai diikuti oleh Program Strata 2 (S2) sebanyak 13 pegawai, dan selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

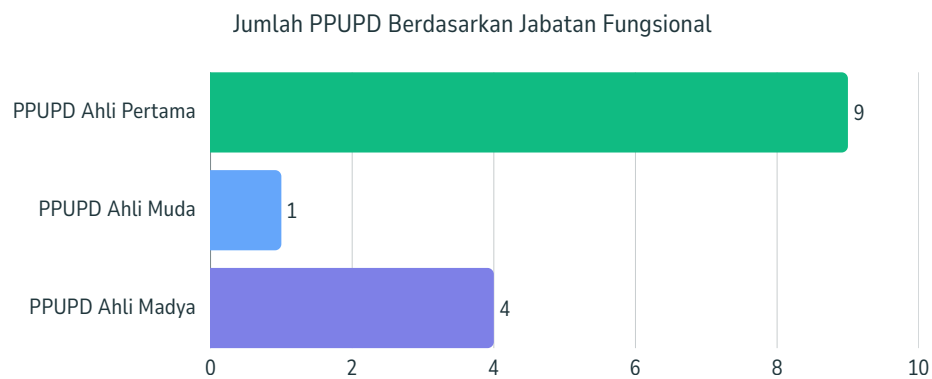


Berdasarkan Jabatan struktural sebanyak delapan orang yang terdiri dari satu orang jabatan Inspektur, satu orang jabatan Sekretaris, dua orang Kepala Subbagian, dan empat orang jabatan Inspektur Pembantu. Untuk jabatan fungsional sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 orang jabatan fungsional Auditor, 14 orang jabatan fungsional PPUPD, 1 orang jabatan Pranata Komputer, dan 1 orang Jabatan Fungsional Arsiparis. Untuk jabatan pelaksana terdapat sebanyak 10 orang.



Jika dikelompokkan berdasarkan jabatan fungsional Auditor, terdapat satu orang atau sekitar 5,26% dengan jabatan fungsional Auditor Penyelia, delapan orang atau sekitar 42,11% dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama, sebanyak delapan orang atau sekitar 42,11% dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Muda, sebanyak dua orang atau 10,53% dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Madya. Untuk saat ini, di Inspektorat Kota Pontianak belum memiliki jabatan fungsional Auditor Ahli Utama.

Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), terdapat sembilan orang atau sekitar 47,37% dengan jabatan fungsional PPUPD Ahli Pertama, sebanyak satu orang atau sekitar 5,26% dengan jabatan fungsional PPUPD Ahli Muda, dan sebanyak empat orang atau 21,05% dengan jabatan fungsional PPUPD Ahli Madya.



Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - September 2025



KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2025

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

- Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif
- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
- Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen

ASISTENSI/PENDAMPINGAN

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Operasional Saber Pungli
- Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Asistensi Lainnya

REVIU

- Reviu RPJMD
- Reviu RKPD
- Reviu RKA
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Penyerapan Anggaran
- Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa

KINERJA

- Audit Kinerja
- Audit Ketaatan
- Evaluasi
- Monitoring

RENCANA DAN REKAPITULASI
REALISASI PENGAWASAN

NO.	PROGRAM	JUMLAH ST EMPAT IRBAN	JUMLAH LHP EMPAT IRBAN		
			RENCANA	REALISASI	PROSES
1	Monitoring dan Evaluasi	3	32	32	-
2	Reviu	27	62	37	25
3	Monitoring	3	3	3	-
4	Evaluasi	7	45	44	1
5	Verifikasi dan Validasi	1	1	1	-
6	Probity Audit	7	7	4	3
7	Audit Ketaatan	3	3	-	3
8	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3	3	-	3
9	Pendampingan	-	-	-	-
10	Audit Kinerja	-	-	-	-

Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - 25 September 2025

RENCANA DAN REKAPITULASI REALISASI
PENGAWASAN IRBAN I

NO.	PROGRAM	JUMLAH ST	JUMLAH LHP		
			RENCANA	REALISASI	PROSES
1	Monitoring dan Evaluasi	1	10	10	-
2	Reviu	8	30	20	10
3	Monitoring	1	1	1	-
4	Evaluasi	3	21	21	-
5	Verifikasi dan Validasi	1	1	1	-
6	Probity Audit	2	2	1	1
7	Audit Ketaatan	-	-	-	-
8	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-
9	Pendampingan	-	-	-	-
10	Audit Kinerja	-	-	-	-

Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - 25 September 2025

RENCANA DAN REKAPITULASI REALISASI
PENGAWASAN IRBAN II

NO.	PROGRAM	JUMLAH ST	JUMLAH LHP		
			RENCANA	REALISASI	PROSES
1	Monitoring dan Evaluasi	1	12	12	-
2	Reviu	5	8	8	-
3	Monitoring	-	-	-	-
4	Evaluasi	1	12	12	-
5	Verifikasi dan Validasi	-	-	-	-
6	Probity Audit	3	3	1	2
7	Audit Ketaatan	1	1	-	1
8	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-
9	Pendampingan	-	-	-	-
10	Audit Kinerja	-	-	-	-

Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - 25 September 2025

RENCANA DAN REKAPITULASI REALISASI
PENGAWASAN IRBAN III

NO.	PROGRAM	JUMLAH ST	JUMLAH LHP		
			RENCANA	REALISASI	PROSES
1	Monitoring dan Evaluasi	1	10	10	-
2	Reviu	4	13	2	11
3	Monitoring	1	1	1	-
4	Evaluasi	1	10	10	-
5	Verifikasi dan Validasi	-	-	-	-
6	Probit Audit	2	2	2	-
7	Audit Ketaatan	2	2	-	2
8	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-
9	Pendampingan	-	-	-	-
10	Audit Kinerja	-	-	-	-

Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - 25 September 2025

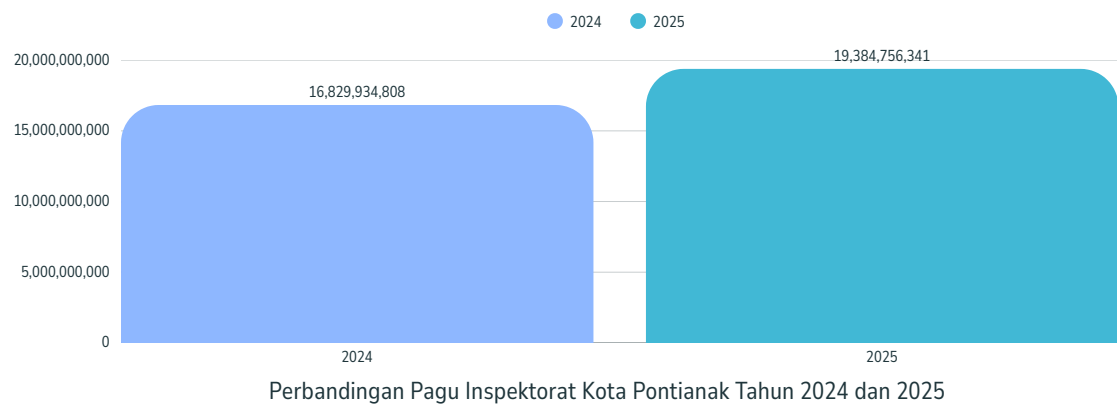
RENCANA DAN REKAPITULASI REALISASI
PENGAWASAN IRBAN KHUSUS

NO.	PROGRAM	JUMLAH ST	JUMLAH LHP		
			RENCANA	REALISASI	PROSES
1	Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-
2	Reviu	10	11	7	4
3	Monitoring	1	1	1	-
4	Evaluasi	2	2	1	1
5	Verifikasi dan Validasi	-	-	-	-
6	Probit Audit	-	-	-	-
7	Audit Ketaatan	-	-	-	-
8	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3	3	-	3
9	Pendampingan	-	-	-	-
10	Audit Kinerja	-	-	-	-

Sumber: Umum Aparatur, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat Kota Pontianak - 25 September 2025



Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak didukung anggaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024. Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.006.558. Dan pada tahun 2025, Inspektorat Kota Pontianak mengalami perubahan pagu menjadi Rp. 19.384.756.341 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan sebesar 15,18%.

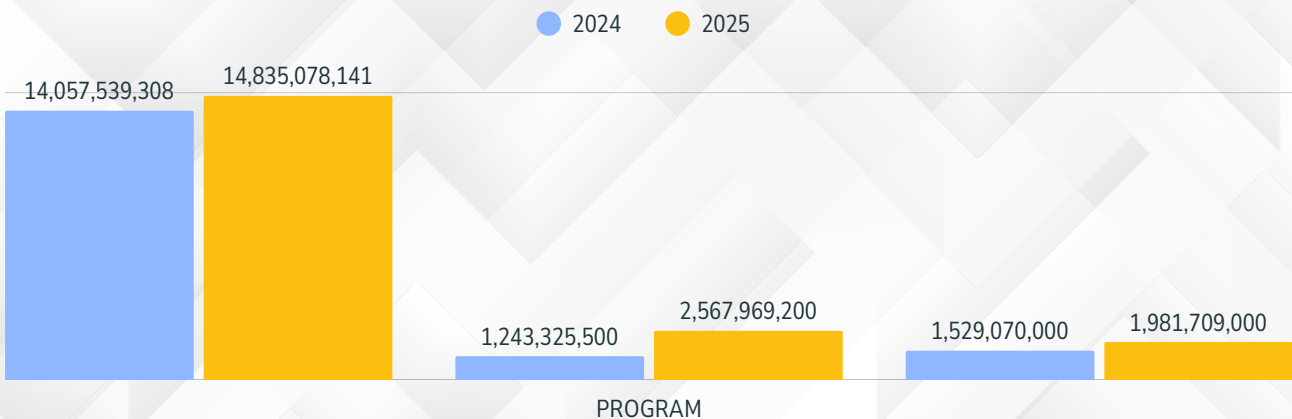


Inspektorat Kota Pontianak terdapat tiga Program prioritas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Perbandingan pagu anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan Program adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pagu Inspektorat Kota Pontianak dari Tahun 2024 - 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
INSPEKTORAT	16.829.934.808	19.384.756.341	2.554.821.533	15,18%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.057.539.308	14.835.078.141	777.538.833	5,53%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.243.325.500	2.567.969.200	1.324.643.700	106,54%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.529.070.000	1.981.709.000	452.639.000	29,60%

Sumber: Perencanaan dan Keuangan



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 terdapat tujuh kegiatan dan 26 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat tujuh kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.329.000	- -	96.329.000	-100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.790.500	- -	57.790.500	-100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.672.500	- -	8.672.500	-100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.672.500	- -	8.672.500	-100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.222.500	- -	16.222.500	-100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.971.000	- -	4.971.000	-100,00%

Kegiatan:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.048.032.808	10.611.116.921	1.563.084.113	17,28%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.033.444.808	10.611.116.921	1.577.672.113	17,46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.294.000	- -	7.294.000	-100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.294.000	- -	7.294.000	-100,00%

Kegiatan:
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.947.040.000	735.931.000 -	1.211.109.000	-62,20%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.580.000	141.590.000	53.010.000	59,84%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.857.460.000	591.341.000 -	1.266.119.000	-68,16%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	1.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	2.000.000	1.000.000	100,00%

Kegiatan:
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.322.103	1.044.384.900	231.062.797	28,41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.541.100	7.933.400	1.392.300	21,29%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.756.303	156.020.500	64.264.197	70,04%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.615.400	62.513.400	41.898.000	203,24%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.885.000	216.123.000	111.238.000	106,06%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.635.300	59.294.600	9.659.300	19,46%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	-	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	538.389.000	541.000.000	2.611.000	0,48%

Kegiatan:
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.293.715.985	1.550.717.800	257.001.815	19,87%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.293.715.985	1.550.717.800	257.001.815	19,87%

Kegiatan:
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.733.612	656.917.820 -	55.815.792	-7,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.762.060	182.720.000 -	50.042.060	-21,50%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.940.000	43.900.000 -	47.040.000	-51,73%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.031.552	430.297.820	41.266.268	10,61%

Kegiatan:
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.365.800	236.009.700	89.643.900	61,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.170.000	91.608.900	7.438.900	8,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.300.000	114.340.000	67.040.000	141,73%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.849.000	- -	9.849.000	-100,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.046.800	30.060.800	25.014.000	495,64%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada tahun 2024 dan 2025, terdapat dua kegiatan dan delapan sub kegiatan.

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pengawasan Internal

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	855.375.500	1.933.409.200	1.078.033.700	126,03%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	348.650.000	670.040.000	321.390.000	92,18%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	182.735.000	384.044.000	201.309.000	110,16%
Reviu Laporan Kinerja	9.420.000	38.940.000	29.520.000	313,38%
Reviu Laporan Keuangan	18.740.000	42.460.000	23.720.000	126,57%
Kerja Sama Pengawasan Internal	5.730.500	234.530.000	228.799.500	3992,66%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	290.100.000	563.395.200	273.295.200	94,21%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	387.950.000	634.560.000	246.610.000	63,57%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	201.690.000	266.290.000	64.600.000	32,03%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	186.260.000	368.270.000	182.010.000	97,72%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asisten pada tahun 2024 dan 2025 terdapat dua kegiatan dengan masing-masing sub kegiatan sejumlah enam sub kegiatan dan lima sub kegiatan.

Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.050.000	19.800.000	13.750.000	227,27%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3.025.000	19.800.000	16.775.000	554,55%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3.025.000	- -	3.025.000	-100,00%

Kegiatan:
Pendampingan dan Asistensi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
Pendampingan dan Asistensi	1.523.020.000	1.961.909.000	438.889.000	28,82%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	27.020.000	80.160.000	53.140.000	196,67%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	458.655.000	472.360.000	13.705.000	2,99%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	635.755.000	1.093.679.000	457.924.000	72,03%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	401.590.000	315.710.000 -	85.880.000	-21,38%

REALISASI ANGGARAN TA 2025

Realisasi anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.102.599.092. atau sebesar 57,27% dari pagu perubahan sebesar Rp19.384.756.341. Realisasi tersebut bersumber dari aplikasi SIPD - Penatausahaan Keuangan per tanggal 30 September 2025. Berikut rincian realisasi anggaran Inspektorat Kota Pontianak per program:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
INSPEKTORAT	19.384.756.341	11.102.599.092	57,27%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.835.078.141	9.542.550.092	64,32%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.567.969.200	1.070.180.000	41,67%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.981.709.000	489.869.000	24,72%

Sumber: Perencanaan dan Keuangan - 30 September 2025

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	#DIV/0!
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!

Kegiatan:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.611.116.921	7.384.753.169	69,59%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.611.116.921	7.384.753.169	69,59%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	#DIV/0!

Kegiatan:
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	735.931.000	411.402.533	55,90%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141.590.000	-	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	591.341.000	411.402.533	69,57%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-	0,00%

Kegiatan:
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.044.384.900	447.192.081	42,82%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.933.400	7.933.400	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.020.500	62.957.427	40,35%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.513.400	9.745.600	15,59%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.123.000	44.896.000	20,77%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.294.600	11.250.000	18,97%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	960.000	64,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541.000.000	309.449.654	57,20%

Kegiatan:
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.550.717.800	830.901.600	53,58%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.550.717.800	830.901.600	53,58%

Kegiatan:
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.917.820	398.301.509	60,63%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.720.000	120.258.229	65,82%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.900.000	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.297.820	278.043.280	64,62%

Kegiatan:
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.009.700	69.999.200	29,66%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.608.900	44.019.200	48,05%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.340.000	25.980.000	22,72%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.060.800	-	0,00%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pengawasan Internal

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.933.409.200	767.090.000	39,68%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	670.040.000	235.830.000	35,20%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.044.000	144.980.000	37,75%
Reviu Laporan Kinerja	38.940.000	37.900.000	97,33%
Reviu Laporan Keuangan	42.460.000	38.980.000	91,80%
Kerja Sama Pengawasan Internal	234.530.000	11.200.000	4,78%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	563.395.200	298.200.000	52,93%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	634.560.000	303.090.000	47,76%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	266.290.000	164.110.000	61,63%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	368.270.000	138.980.000	37,74%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI

Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	19.800.000	3.900.000	19,70%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	19.800.000	3.900.000	19,70%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	-	-	#DIV/0!

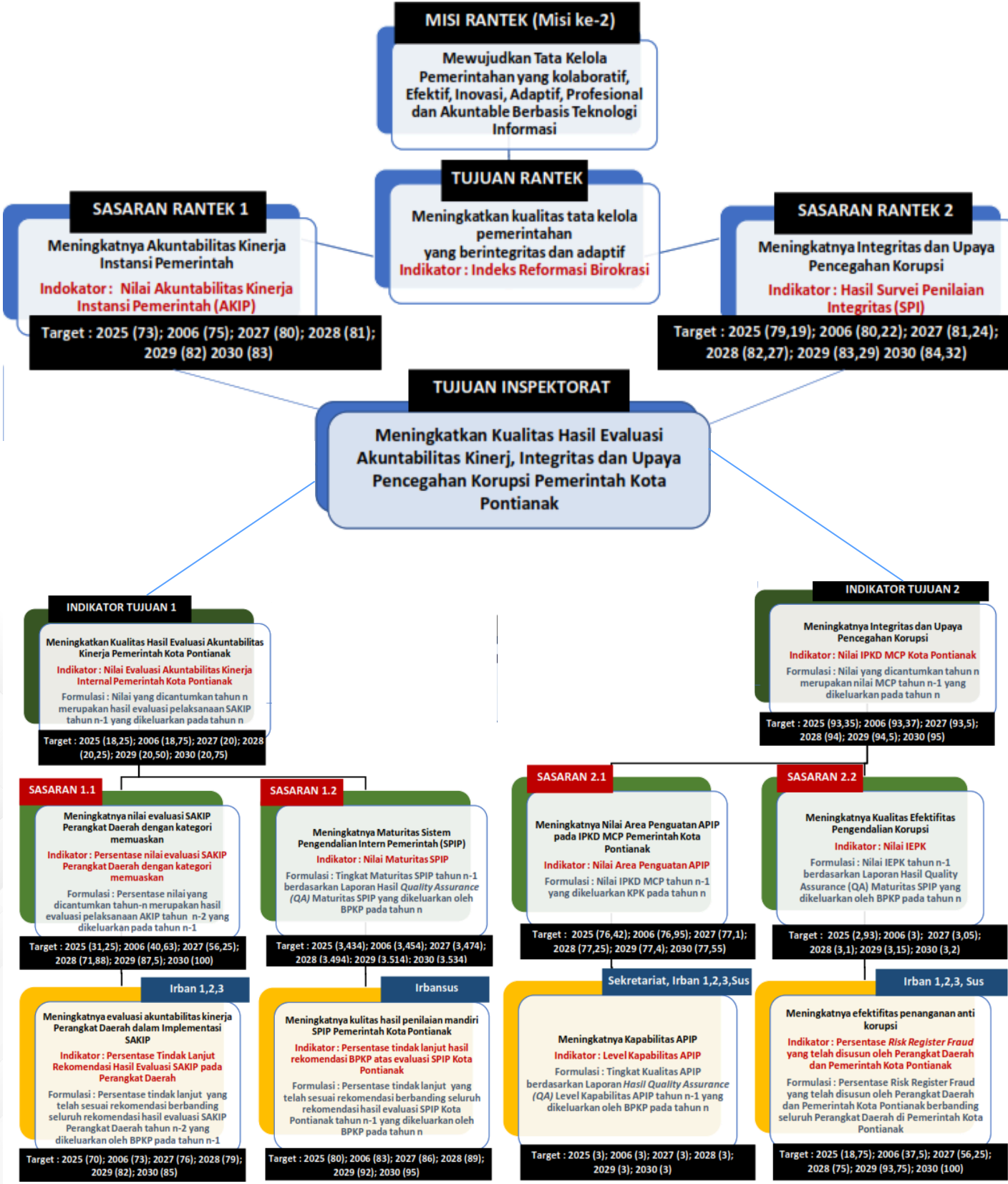
Kegiatan:
Pendampingan dan Asistensi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2025	REALISASI	%
Pendampingan dan Asistensi	1.961.909.000	485.969.000	24,77%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	80.160.000	-	0,00%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	472.360.000	86.164.000	18,24%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.093.679.000	368.365.000	33,68%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	315.710.000	31.440.000	9,96%



CAPAIAN KINERJA

TUJUAN & SASARAN INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK



1

Skor Maturitas APIP

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	NILAI	3,5	3,3	94,29%
2024	NILAI	3,4	3,4	100%

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	%	83%	74,84%	90,17%
2024	-	-	-	-

2

3

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	%	100%	34,48%	34,48%
2024	-	-	-	-

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar Diusulkan Memperoleh Predikak WBK/WBMM

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	%	20%	-	-
2024	-	-	-	-

4

5

Level Kapabilitas APIP

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Level	3	3	100%
2024	-	-	-	-

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

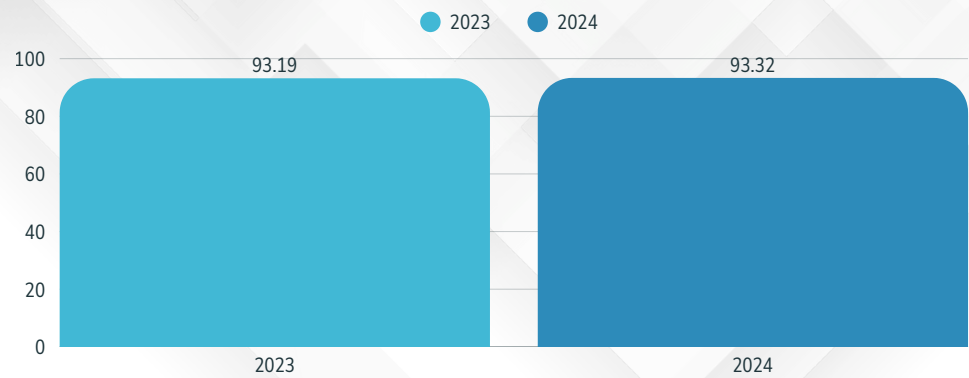
TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	%	-	-	-
2024	%	31.25%	25%	80%

6

MONITORING CONTROLLING SURVEILLANCE FOR PREVENTION

Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.

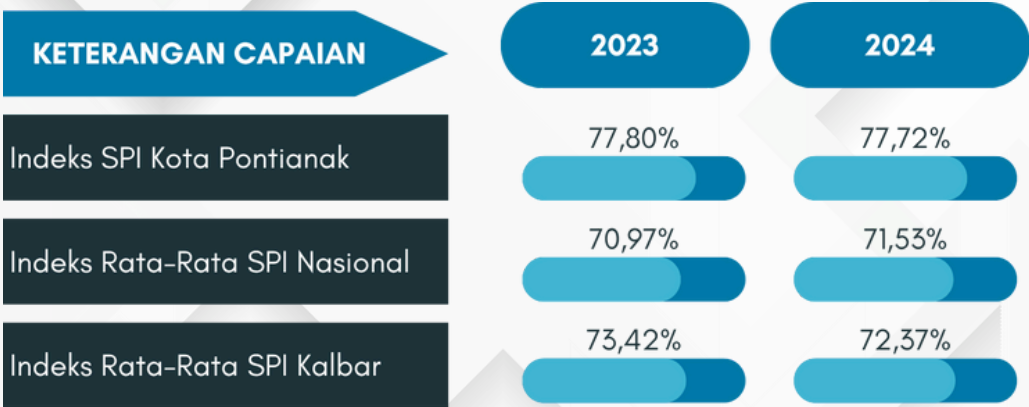
Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pontianak memperoleh capaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) sebesar 93,32 dengan selisih MCP Tahun 2023 sebesar 0,13.



Area Perencanaan & Penganggaran 202399,17% 2024100%	Area Penganggaran 2023- 202498,31%
Area Pengadaan Brang Jasa 202397,86% 202496.46%	Area Pengadaan Brang Jasa 202397,86% 202496.46%
Area Perizinan 2023100% 2024100%	Area Pengawasan APIP 202378,00% 202476,41%
Area Manajemen ASN 202393,03% 202495,88%	Area Optimalisasi Pajak 202392,09% 202484,81%
Area Pengelolaan BMD 202391,44% 202492,90%	

SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS

Tahun 2024, Survei Penilaian Integritas (SPI) telah melibatkan 642 responden yang mencakup pegawai, pengguna layanan, vendor, hingga para ahli. Data dikumpulkan melalui metode random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* 5%. Indeks SPI instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100). Indeks Integritas Pemerintah Kota Pontianak 2024 berada di angka 77.72, menunjukkan Pemerintah Kota Pontianak berada pada kategori waspada. Angka ini mencerminkan penurunan dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama berasal dari adanya perubahan dari sudut pandang responden Internal yakni sebesar penurunan sebesar 8.3 poin dibandingkan tahun 2023.

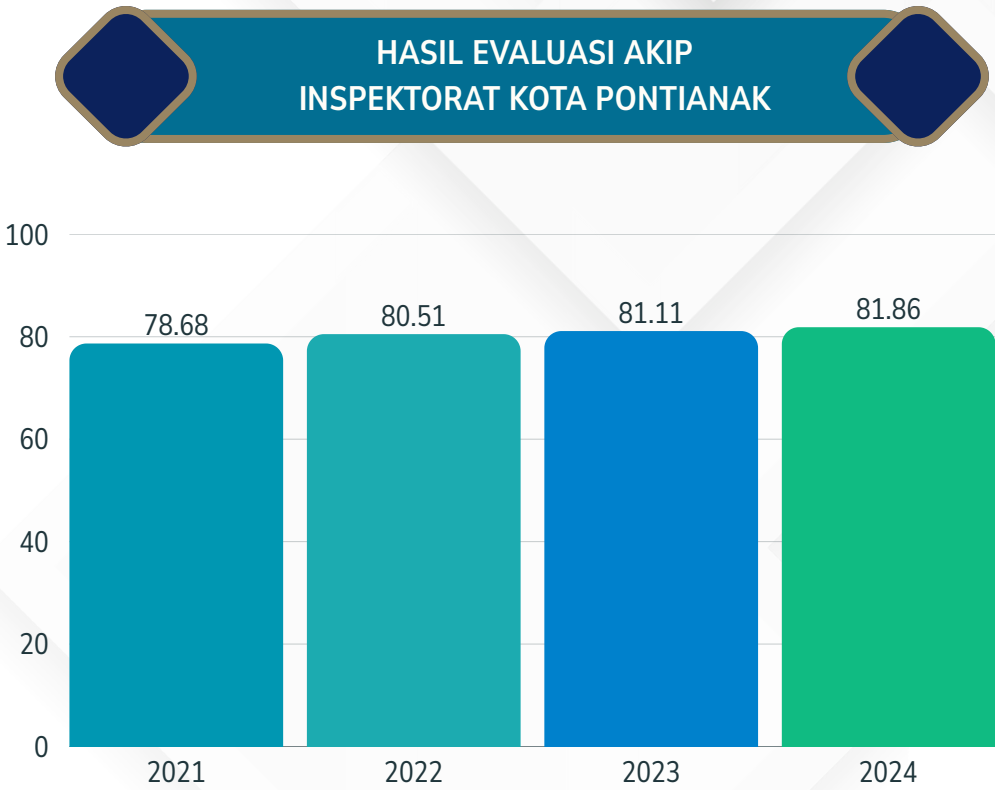


MANDATORY SPENDING TAHUN 2025

URAIAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
PEMENUHAN MANDATORY SPENDING	0,60	0,42
Total Belanja Daerah (APBD)	2.478.882.585.019	2.219.793.351.501
Total Belanja (Pagu) Inspektorat	25.006.558.891	19.384.756.341
Total Belanja Gaji dan Tunjangan Inspektorat	10.018.748.891	10.611.116.921
Total Belanja Pengawasan	14.987.810.000	8.773.639.420
Persentase Belanja Pengawasan Terhadap APBD	0,60	0,39
Persentase Mandatory Spending yang dipersyaratkan Permendagri	0,50	0,50
Belanja Pengawasan Minimal untuk Pemenuhan Mandatory Spending	0,50	11.098.966.758
Terpenuhi/Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
Kelebihan/Kekurangan Belanja Pengawasan	2.588.397.075	-1.746.088.359



Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, Pemerintah Kota Pontianak menunjukkan nilai sebesar 71,04 dengan predikati “BB”. Terjadi penurunan sebesar 1,53 dari tahun sebelumnya dengan nilai 72,57.



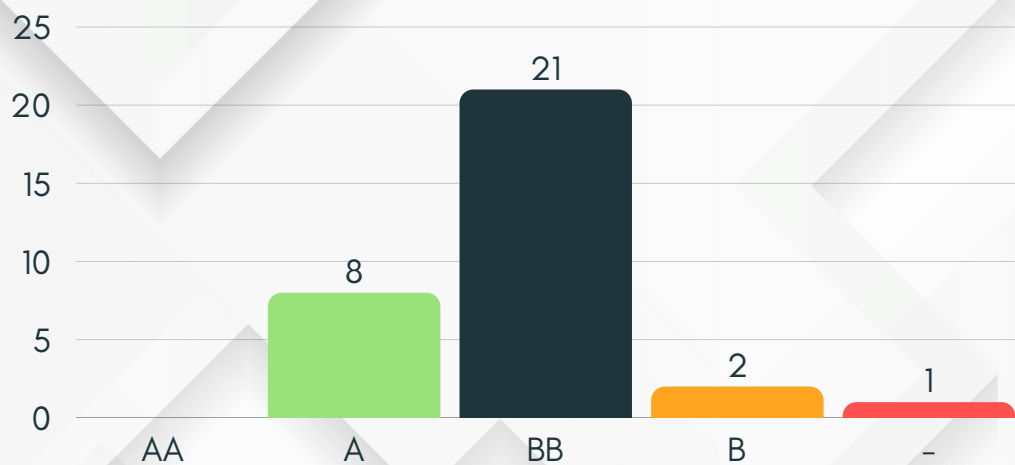
Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, Inspektorat Kota Pontianak menunjukkan nilai sebesar 81,86 dengan predikati “A”. Terjadi peningkatan sebesar 0,75 dari tahun sebelumnya dengan nilai 81,11.

HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	LAKIP TAHUN 2023			LAKIP TAHUN 2024		
		NILAI	PREDIKAT	KET.	NILAI	PREDIKAT	KET.
1.	Dinas Kesehatan	90,01	A	Memuaskan	90,46	AA	Sangat Memuaskan
2.	Kecamatan Pontianak Barat	76,46	BB	Sangat Baik	77,51	BB	Sangat Baik
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,51	A	Memuaskan	84,96	A	Memuaskan
4.	Dinas Sosial	76,16	BB	Sangat Baik	77,81	BB	Sangat Baik
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	76,36	BB	Sangat Baik	77,71	BB	Sangat Baik
6.	Kecamatan Pontianak Utara	72,71	BB	Sangat Baik	74,06	BB	Sangat Baik
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73,81	BB	Sangat Baik	74,91	BB	Sangat Baik
8.	Kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik	74,71	BB	Sangat Baik	74,86	BB	Sangat Baik
9.	Sekretariat Daerah	81,51	A	Memuaskan	83,01	A	Memuaskan
10.	Dinas Perhubungan	80,31	A	Memuaskan	82,86	A	Memuaskan
11.	Badan Keuangan Daerah (BKAD)	80,10	A	Memuaskan	80,46	A	Memuaskan
12.	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Satu Pintu	77,51	BB	Sangat Baik	80,60	A	Memuaskan
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,51	A	Memuaskan	82,11	A	Memuaskan
14.	Inspektorat Kota Pontianak	81,11	A	Memuaskan	81,86	A	Memuaskan
15.	Badan Pendapatan Daerah				75,11	BB	Sangat Baik
16.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	74,85	BB	Sangat Baik	75,16	BB	Sangat Baik
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	74,06	BB	Sangat Baik	75,41	BB	Sangat Baik
18.	Dinas Tenaga Kerja	68,65	B	Baik	69,05	B	Baik
19.	Kecamatan Pontianak Selatan	74,10	BB	Sangat Baik	76,76	BB	Sangat Baik
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,01	BB	Sangat Baik	74,21	BB	Sangat Baik
21.	Sekretariat DPRD	78,71	BB	Sangat Baik	78,86	BB	Sangat Baik
22.	Kecamatan Pontianak Tenggara	72,81	BB	Sangat Baik	75,26	BB	Sangat Baik
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,41	A	Memuaskan	82,01	A	Memuaskan
24.	Dinas Lingkungan Hidup	77,46	BB	Sangat Baik	78,96	BB	Sangat Baik
25.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	78,06	BB	Sangat Baik	78,06	BB	Sangat Baik
26.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	75,76	BB	Sangat Baik	77,41	BB	Sangat Baik
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPERINDA	76,76	BB	Sangat Baik	76,76	BB	Sangat Baik
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,56	BB	Sangat Baik	76,51	BB	Sangat Baik
29.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77,91	BB	Sangat Baik	75,01	BB	Sangat Baik
30.	Dinas Perpustakaan	71,71	BB	Sangat Baik	74,51	BB	Sangat Baik
31.	Kecamatan Pontianak Timur	70,56	BB	Sangat Baik	71,31	BB	Sangat Baik
32.	Kecamatan Pontianak Kota	67,81	B	Baik	70,86	BB	Sangat Baik

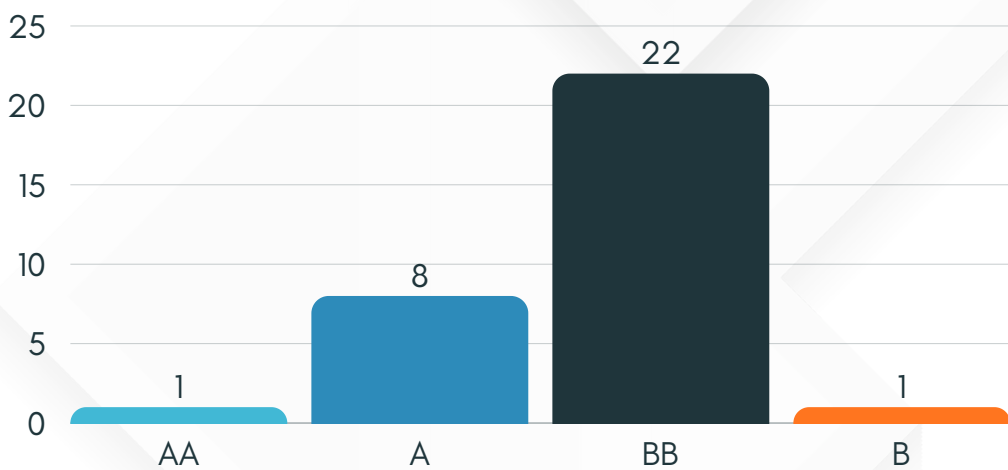
TREN NILAI SAKIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 - 2024

Nilai Tahun 2023



Dari evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2023, jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat “**A**” sebanyak delapan OPD. Sedangkan jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat “**BB**” sebanyak 21 OPD. Dan jumlah Perangkat Daerah Daerah yang mendapatkan predikat “**B**” sebanyak dua OPD.

Nilai Tahun 2024



Pada tahun 2024, dari 32 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang mendapatkan nilai dengan predikat “**AA**” adalah **Dinas Kesehatan**. Untuk predikat “**A**”, terdapat delapan OPD. Sedangkan untuk predikat “**BB**”, terdapat 22 OPD. Dan terdapat satu OPD yang mendapatkan predikat “**B**”.

KAPABILITAS APIP

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Pontianak oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 dan 2024 disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 3 dengan Skor 3,00 sebagaimana uraian berikut:

ELEMEN	LEVEL	SKOR 2023	SKOR 2024
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	0,54
Praktik Profesional	3	0,54	0,54
Akuntabilitas dan Manajemen	3	0,18	0,18
Budaya dan Hubungan Organsisasi	3	0,18	0,18
Struktur Tata Kelola	3	0,36	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
Peran Layanan	3	1,20	1,20
Simpulan Entitas		3,00	3,00

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sehingga semua elemen telah mencapai level 3.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak, diuraikan sebagai berikut:

- 1.Skor Maturitas penyelenggaraan SPIP yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu **3,354** atau **Level 3 (Terdefinisi)**. Sedangkan pada tahun 2024, nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Pontianak mengalami peningkatan sebesar 0,030 dengan nilai **3,384** atau telah memenuhi karakteristik pada **Level 3 (Terdefinisi)**.
- 2.Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu 3,056. Untuk tahun 2024, nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,216 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3.
- 3.Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu 2,36. Dan untuk tahun 2024, nilai IEPK Pemerintah Kota Pontianak mengalami peningkatan sebesar **0,550** yaitu **2,910** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2**.

NO.	FOKUS PENILAIAN	NILAI 2023	NILAI 2024	SELISIH
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,354	3,384	0,030
2	Manajemen Risiko Indeks (MR)	3,056	3,216	0,160
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,360	2,910	0,550

KERUGIAN DAERAH

KASUS KERUGIAN DAERAH YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 13 kasus senilai Rp13.751.451.051,00 yang telah dipulihkan sebanyak Rp10.650.981.589,06 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp3.100.469.461,94.

No.	Uraian	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran/ Penyelesaian (Rp)	Sisa (Rp)
1	SKTJM-TP	1	195.445.900,00	166.900.000,00	28.545.900,00
2	SKTJM-TGR	8	9.285.037.719,00	7.120.641.413,06	2.164.396.305,94
3	SKTJM-Pihak III	1	100.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00
4	Peradilan	3	4.170.967.432,00	3.343.440.176,00	827.527.256,00
Jumlah		13	13.751.451.051,00	10.650.981.589,06	3.100.469.461,94

KASUS KERUGIAN DAERAH YANG MASIH DALAM PROSES PENETAPAN PEMBEBASAN

Sebanyak delapan kasus senilai Rp17.545.887.598,50 yang telah dipulihkan sebesar Rp6.076.114.950,00. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp11.469.772.648,90.

No.	Uraian	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran/ Penyelesaian (Rp)	Sisa (Rp)
1	TP	2	188.796.800,00	158.710.000,00	30.086.800,00
2	TGR	5	732.827.079,50	298.401.950,00	434.425.129,50
3	Pihak III	1	16.624.263.719,00	5.619.003.000,00	11.005.260.719,00
Jumlah		8	17.545.887.598,50	6.076.114.950,00	11.469.772.648,50

KASUS KERUGIAN DAERAH YANG MASIH BERUPA INFORMASI LHP BPK DAN APIP

Sebanyak 53 kasus senilai Rp6.539.394.394,43 yang telah dipulihkan sebesar Rp3.736.494.894,07. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp2.813.899.500,36.

No.	Uraian	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran/ Penyelesaian (Rp)	Sisa (Rp)
1	LHP BPK	23	3.509.234.759,74	2.793.257.259,38	715.977.500,36
2	LHP APIP	30	3.030.159.634,69	933.237.634,69	2.096.922.000,00
	Inspektorat Kota Pontianak	25	146.605.559,34	146.605.559,34	-
	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	3	2.814.167.800,00	716.245.800,00	2.097.922.000,00
	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	67.400.000,00	67.400.000,00	-
	Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	1	2.986.275,35	2.986.275,35	-
Jumlah		53	6.539.394.394,43	3.726.494.894,07	2.812.899.500,36



DOKUMENTASI KEGIATAN

KOTA PONTIANAK

Dokumentasi



**ANTI
GRATIFIKASI**

Merdeka dari Gratifikasi, Pemkot Pontianak Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang dijalankan secara sistematis oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di bawah koordinasi Inspektori Kota Pontianak. Upaya ini tak hanya menasap aparat sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan masyarakat luas melalui berbagai sosialisasi dan kampanye publik.

Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulidia, menegaskan bahwa gratifikasi bukan sekadar pemberian atau hadiah, melainkan termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika nilainya melebihi batas yang diperbolehkan, gratifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman minimal empat tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda mulai Rp200 juta hingga Rp1 miliar, ujarnya.

Kampanye di Ruang Publik
Untuk menumbuhkan kesadaran bersama, Pemkot Pontianak memanfaatkan ruang publik seperti Car Free Day (CFD) di kawasan Ahmad Yani. Pada kesempatan itu, ASN bersama masyarakat menggelar aksi pembagian bendera Merah Putih bertuliskan slogan "Merdeka dari Gratifikasi". Kite ASN Tolak Gratifikasi". Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan turut membagikan stiker dan pamflet edukasi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa menolak gratifikasi adalah langkah nyata menjaga integritas.

Menurutnya, pendekatan di ruang publik menjadi strategi efektif agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat. "Kuncinya adalah kesadaran bersama. Semakin paham masyarakat tentang gratifikasi, semakin kecil peluang praktik korupsi terjadi," katanya.

Aturan dan Pengecualian
Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2020 secara tegas mengatur batasan gratifikasi. Pemberian yang diperbolehkan, misalnya hadiah antarkan kerja dalam bentuk barang bukan uang, maksimal Rp300 ribu per orang dengan akumulasi tidak lebih dari Rp1 juta dalam setahun dari pemberi yang sama. Namun, dalam hal pemberian terkait jabatan atau berlawanan dengan kewajiban, ASN wajib menolak atau melaporkan ke-

pada UPG maupun melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK.

Pelaporan bisa dilakukan maksimal 10 hari kerja ke UPG atau 30 hari kerja ke KPK. Ini adalah mekanisme resmi agar penerimaan gratifikasi tidak menjadi celah korupsi.

Survei Penilaian Integritas (SPI)

Selain pengendalian gratifikasi, Pemkot Pontianak juga berpartisipasi aktif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK. Pada 2024, indeks SPI Kota Pontianak mencapai angka 77,72, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Barat (72,37) dan nasional (71,53).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai meski capaian tersebut sudah dinilai baik, namun evaluasi dan perbaikan SPI harus terus ditingkatkan.

"Capaian ini menunjukkan komitmen kita berada di jalur yang tepat, meski tetap ada ruang perbaikan. Tahun ini, SPI kembali berlangsung dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memotret kondisi riil integritas layanan publik kita," ungkapnya.

Menutup Celah Korupsi

Dengan strategi pencegahan yang konsisten, Pemkot Pontianak di bawah pengawasan Inspektori berkomitmen menutup ruang praktik gratifikasi di berbagai lini pelayanan publik.

"Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih. Mari bersama-sama kita wujudkan Pontianak yang bebas dari gratifikasi," ajak Edi.

Dukungan Publik

Dalam proses pelayanan, apresiasi terhadap Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan pelayanan tanpa gratifikasi disampaikan oleh masyarakat selaku penerima layanan. Seperti yang disampaikan oleh Jumi Gusniarti, warga Kota Pontianak yang ditemui saat ia melakukan pengurusan BPHTB pada Loket Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, ia menyampaikan apresiasi kepada petugas atas pelayanan yang baik dan profesional tanpa adanya permintaan imbalan atau bingkisan dalam bentuk apapun oleh petugas.

"Kami bangga atas proses pelayanan yang berjalan lancar, cepat, dan transparan. Dengan ini, dapat menumbuhkan rasa percaya serta nyaman dalam setiap pengurusan" ujarnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Harsono, warga Kota Pontianak, saat



BALON - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas balon merdeka sebagai aksi sosialisasi tolak gratifikasi di area Car Free Day (CFD).



MERDEKA GRATIFIKASI - Balon dengan label stiker yang berisi tolak gratifikasi juga diunggah oleh Wali Kota Edi Kamtono.



SEKAR DINI - Anak-anak sejak dini sudah diberikan edukasi untuk menolak gratifikasi.



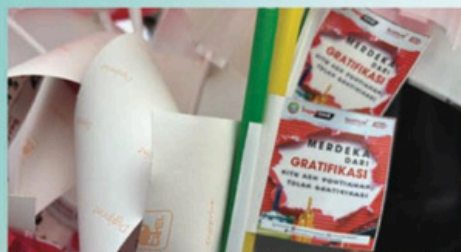
CFD - Sosialisasi pencegahan gratifikasi menyeru masyarakat yang tengah beraktivitas di area Car Free Day (CFD).



BANNER - Banner sosialisasi yang berisi tentang toleransi gratifikasi menolak gratifikasi.



KOMITMEN - ASN peserta sosialisasi SPI dan Anti Gratifikasi berkomitmen untuk mengimplementasikan integritas di lingkungan kerja.



LABEL - Label 'Merdeka dari Gratifikasi' yang ditempel di balon menjadi komitmen ASN Pemerintah Kota Pontianak menolak gratifikasi.



SOSIALISASI - Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulidia membuka sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Anti Gratifikasi.



TRIBUN - Tribun apak untuk memuatkan Survei Penilaian Integritas (SPI).

ANTI GRATIFIKASI



SOSIALISASI





PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT
berintegritas cerdas berkualitas



 inspektorat.pontianak.go.id

 inspektorat@pontianak.go.id

 @inspektorat_kota_pontianak

 (0561) 8103435